

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengharuskan penerapan SAP berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah diatur dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2013. Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013, SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Penerapan SAP berbasis akrual juga diikuti dengan sistem informasi berbasis akrual juga. Oleh karena itu, BPKP melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan SIMDA Online berbasis akrual sebagai sistem informasi manajemen daerah yang digunakan dalam Pengelolaan Keuangan.

Perubahan peraturan mengenai SAP berbasis akrual yang didukung dengan SIMDA Online berbasis akrual, dapat mendorong pengolahan data dengan cepat, lengkap, akurat dan dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Dengan adanya penggunaan sistem informasi menggunakan teknologi dengan pengolahan data elektronik, maka tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi sistem informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruh output yang

dihasilkan dari masing-masing subsistem yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam penyelenggaraan urusan daerah tersebut pemerintah daerah dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) salah satunya Badan Pengelola Keuangan Daerah yang berperan dalam menyusun kebijakan pengelolaan APBD, rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah dan pengelolaan aset daerah serta menyusun laporan keuangan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD. BPKD berkewajiban menyusun rencana strategi berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja. Sistem informasi keuangan daerah Kab. Padang Pariaman yang digunakan sejak tahun 2016 yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah Offline (SIMDA) merupakan perangkat lunak yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara

terintegritas meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Adapun aplikasi SIMDA adalah aplikasi database yang telah mengalami perkembangan melalui perbaikan sejak tahun 2009. Dalam prakteknya aplikasi SIMDA Online diterapkan Pada tahun 2017 secara bertahap dijalankan meskipun belum optimal, terutama untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang besar. Di dalam subsistem input pengumpulan data dari tiap bagian atau bidang sudah berjalan, meskipun masih secara manual karena belum terintegrasinya melalui jaringan komunikasi data online.

Penerapan SIMDA Online dari awalnya SIMDA Offline di Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan pada awal tahun 2017 dimana dengan adanya penerapan tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan terutama dalam penganggaran dimana dengan adanya SIMDA Online ini penganggaran dapat terlaksana dengan efisien dan efektif dibandingkan secara manual atau offline.

Penerapan SIMDA Online di Kab. Padang Pariaman ini secara langsung dapat mendukung peningkatan kinerja individu pengguna SIMDA Online karena awalnya penggunaan sistem informasi sebelumnya yaitu SIPKD dimana sistem ini kurang maksimal dalam menghasilkan output diantaranya laporan pertanggungjawaban kepada *Stakeholder*, Pemeriksa maupun Pemerintah pusat secara e-audit. Sedangkan SIMDA Online versi 2.7 berbasis akrual ini dapat menghasilkan data sebagai berikut : Data gaji pegawai pada belanja pegawai melalui SIMDA Gaji, Data barang milik daerah pada belanja modal dan aset tetap melalui SIMDA Aset, APBD beserta perubahannya, SPM, SP2D, Jurnal transaksi akrual, Buku besar, Neraca, Laporan operasional, Laporan perubahan ekuitas,

Laporan realisasi anggaran, Laporan perubahan SAL, Laporan arus kas dan lainnya. (Fuad dan Fefri, 2013)

Penerapan SIMDA pada pengelolaan keuangan Pemerintah daerah Kab. Padang Pariaman belum berjalan optimal dimana dapat dilihat dari realisasi anggaran suatu kegiatan yang telah direncanakan oleh OPD dengan target anggaran yang direncanakan tidak mengalami perubahan secara signifikan dari tahun 2014 sebelum penerapan SIMDA sampai tahun 2017 sesudah penerapan SIMDA. Adapun faktor yang penyebabnya yaitu keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya (SDM), kurangnya dukungan legislatif, kelemahan data kinerja. (Damanhuri, 2016)

Berdasarkan faktor penyebab kurang optimalnya penerapan SIMDA Online pada Kab. Padang Pariaman sebagai Sistem Informasi Manajemen Daerah. Dapat disimpulkan bahwa penerapan SIMDA Online bisa berjalan optimal jika didukung dengan pihak pengguna (*User*) SIMDA Online itu sendiri agar kinerja individu pengguna juga meningkat dari waktu ke waktu dan pengelolaan keuangan Kab. Padang Pariaman berjalan optimal dengan Sumber Daya yang bisa mengendalikan sistem yang telah ditetapkan sehingga kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang baik terwujud.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen SIMDA Online yang diharapkan dapat mempengaruhi Kinerja Individu Pengguna (*User*) yaitu Bendahara Umum dan Bendahara Pembantu selaku Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan target kinerja yang telah ditentukan sesuai penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Penerapan SIMDA Online di Kab. Padang Pariaman ini belum optimal dikarenakan beberapa faktor baik faktor dari pengguna SIMDA Online maupun faktor lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti mengenai Penerapan SIMDA Online dengan Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dilihat dari segi Pengguna SIMDA Online dimana peningkatan kinerja individu pengguna (*User*) SIMDA Online dapat dilihat dari penerapan SIMDA Online, rumusan masalah penelitian berikut dikembangkan:

1. Bagaimanakah pengaruh persepsi kemudahan (*Perceived Ease to Use*) terhadap kinerja pengguna dalam implementasi SIMDA Online ?
2. Bagaimanakah pengaruh persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*) terhadap kinerja pengguna dalam implementasi SIMDA Online ?
3. Bagaimanakah pengaruh pengalaman menggunakan komputer terhadap kinerja pengguna dalam implementasi SIMDA Online ?
4. Bagaimanakah pengaruh intensi penggunaan terhadap kinerja pengguna dalam implementasi SIMDA Online ?
5. Bagaimanakah pengaruh penggunaan nyata terhadap kinerja pengguna dalam implementasi SIMDA Online ?

6. Bagaimanakah pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, pengalaman menggunakan computer, intensi penggunaan dan penggunaan nyata terhadap kinerja pengguna dalam implementasi SIMDA Online ?

1.3 Tujuan penelitian

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat diuraikan tujuan dalam melakukan penelitian, diantaranya:

1. Mengetahui pengaruh persepsi kemudahan (Perceived Ease to Use) terhadap kinerja pengguna dalam implementasi SIMDA Online
2. Mengetahui pengaruh persepsi kegunaan (Perceived usefulness) terhadap kinerja pengguna dalam implementasi SIMDA Online.
3. Mengetahui pengaruh pengalaman menggunakan komputer terhadap kinerja pengguna dalam implementasi SIMDA Online.
4. Mengetahui pengaruh intensi penggunaan terhadap kinerja pengguna dalam implementasi SIMDA Online.
5. Mengetahui pengaruh penggunaan nyata terhadap kinerja pengguna dalam implementasi SIMDA Online.
6. Mengetahui pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, pengalaman menggunakan komputer, intensi penggunaan dan penggunaan nyata terhadap kinerja pengguna dalam implementasi SIMDA Online.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan pada Kab. Padang Pariaman ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, sebagai bahan tambahan referensi dan wacana khususnya yang berkaitan dengan masalah implementasi SIMDA Online dengan *Technology Acceptance Model* (TAM), kinerja pengguna SIMDA Online.

2. Praktis

Bagi Kab. Padang Pariaman terutama pengguna SIMDA Online, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah tersebut untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari peningkatan kinerja pengguna SIMDA Online terlebih dahulu.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih jelas dan terfokus pada permasalahan yang dibahas, maka perlu disusun suatu sistematika penulisan yang tepat. Skripsi ini disusun dalam 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi landasan teori (*technology acceptance model*, SIMDA online, pengelolaan keuangan daerah), eview penelitian, kerangka berfikir, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tempat penelitian, populasi dan sampel, metode penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, devisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

